

Media Massa dan “Political Literacy”: Pemanfaatan Berita Politik di Kalangan Remaja Kota Bandung

Karim Suryadi

ABSTRACT

The role of mass media in creating cognitive response concerning input function, conversion process, and political system output is lower than political system capability. This difference is due to two reasons: (1) in teenager's thinking domain, input function, conversion process, and political output are more theoretical-abstract; (2) political news exposure in mass media is more highlighting demanded citizen characteristics as important attributes of political system capability. This means that though teenagers are considered to be important in political domain, political news exposure has not been considering teenagers' psycho-political aspect.

Kata kunci: political news, political socialization, cognition, political system function and capabilities

Pendahuluan

Pemilihan bupati/wali kota yang berlangsung hampir tiap bulan, memicu intensitas berita politik di media massa yang beredar di Jawa Barat. Intensitas berita politik kian bertambah menjelang penyelenggaraan pemilihan gubernur pada 2008. Kondisi ini berlaku pula untuk media massa nasional, karena pemilihan kepala daerah berlangsung pula di provinsi/kabupaten lain di tanah air.

Meski daya tarik berita politik bagi remaja tak sekuat musik atau *sport*, namun beralasan untuk memperhitungkannya karena remaja ditempatkan sebagai segmen penduduk yang penting dalam kancah politik. Dengan berbagai cara, setiap pasangan kandidat dan partai politik berlomba menarik perhatian remaja untuk meraup dukungan dari kalangan pemilih pemula ini.

Lebih dari itu, dalam kehidupan politik pada umumnya, remaja dinisbatkan sebagai elemen generasi muda yang penting. Kepada generasi

mudalah harapan masa depan kehidupan politik dan bangsa digantungkan. Karena itu, dalam setiap kampanye, pembinaan remaja senantiasa menjadi jargon yang diusung kandidat.

Namun, seberapa besar peranan media massa dalam membentuk pengetahuan remaja tentang fungsi-fungsi sistem politik, belum teridentifikasi secara faktual. Media massa dipilih sebagai kasus, karena pendidikan politik (bagi remaja) belum menjadi agenda penting para politisi. Di sisi lain, intensitas berita politik di media massa terus meningkat. Kecenderungan ini melandasi dugaan bahwa pertemuan remaja dan media mengandung derajat pembelajaran tertentu tentang mekanisme sistem politik.

Fokus Telaah: Media Massa, Remaja, dan Politik

Dimensi kognitif diyakini menjadi salah satu faktor determinan tingkat partisipasi politik remaja. Tingkat partisipasi dan reaksi-reaksi individu

terhadap sistem politik - untuk sebagian - ditentukan oleh tanggapan kognitifnya. Pengaruh kognisi terhadap tingkat partisipasi individu dalam sistem politiknya telah teridentifikasi dalam studi-studi sosialisasi politik.

Dalam penelitiannya tentang sosialisasi politik Kraus dan Davis (1978) menemukan bahwa demokrasi bertumpu kepada pendidikan, tingkat pengetahuan warga dan tindakan yang bertanggung jawab atas dasar kaidah-kaidah umum. Studi ini mengkonfirmasi bahwa partisipasi politik tanpa kognisi adalah absurditas belaka.

Remaja diyakini memiliki tingkat ketergantungan tertentu terhadap kandungan berita media massa. Berbagai survei yang dilakukan SRI (Survei Riset Indonesia) Media Index mengungkapkan kebiasaan kelompok pembaca berusia 15-19 tahun dalam memanfaatkan koran. Meski ketertarikan mereka terhadap berita politik tidak sebesar minat mereka terhadap *entertainment* atau *sport*, banyak hal yang menggoda mereka untuk mengkaji berita politik yang disajikan koran dan majalah.

Analisis sistem politik beranjak dari asumsi Easton (1964) tentang "pemisahan" sistem politik dari konteks sosialnya. Untuk mendeteksi corak dan tingkat partisipasi politik remaja yang terbentuk karena struktur kognisinya maka elemen sistem politik diandaikan terpisah. Pertanyaannya kemudian bagaimana peranan berita politik dalam membentuk tanggapan kognitif remaja tentang fungsi *input*, proses konversi, fungsi *output*, dan kapabilitas sistem politik Indonesia.

Selain media massa, keterlibatan budaya komunikasi keluarga diperhitungkan dalam kajian ini. Faktor ini dipertimbangkan karena budaya tutur diyakini masih kuat dibanding budaya baca. Lebih dari itu, kemudahan dalam mendapatkan media dan budaya komunikasi keluarga diduga berpengaruh terhadap perilaku bermedia remaja dan dampak yang ditimbulkannya.

Data dalam tulisan ini berasal dari survei terhadap siswa SMA di Kota Bandung pada minggu ketiga Desember 2007. Angket disebarkan kepada responden yang dijangkau dari populasi

remaja di Kota Bandung.

Penarikan sampel menggunakan teknik *multi-stage cluster sampling* karena adanya kesulitan dalam penyusunan kerangka *sampling* lengkap pada tahap awal penelitian. Berdasarkan teknik ini terjaring sebanyak 242 orang responden yang tersebar di delapan wilayah Kota Bandung pada delapan SMA negeri dan swasta.

Belajar Politik lewat Media Massa

Media massa bukan satu-satunya sumber informasi politik bagi remaja. Tingkat ketergantungan remaja terhadap berita politik pun tergolong rendah. Keberlakuan teori efek media terbatas teridentifikasi dalam penelitian ini.

Adanya perolehan pengetahuan akibat terpaan berita politik media massa bukan saja telah mengonfirmasi ulang beberapa hasil penelitian yang telah mengungkapkan efek kognitif media massa, tetapi juga telah menguatkan dugaan keterlibatan media massa dalam pembangunan sistem politik.

Munculnya kecenderungan siaran berita televisi yang lebih digemari dibanding berita radio atau surat kabar, tidak berarti responden lebih mempercayai siaran berita televisi dibanding dua media tadi. Kecenderungan ini lebih disebabkan daya tarik televisi dalam menyajikan gambar secara lebih atraktif.

Di sisi lain, dugaan adanya korelasi terpaan berita politik dengan perubahan kognisi remaja tentang fungsi *input*, proses konversi, *output*, serta kapabilitas sistem politik Indonesia, serta keterlibatan budaya komunikasi keluarga dalam perubahan tadi, mendapatkan validasi empirik. Fakta mengungkapkan korelasi linier yang lemah antara terpaan berita politik dan perubahan tanggapan kognitif remaja tentang fungsi *input* ($r = 0,2984$), proses konversi ($r = 0,3162$), dan tanggapan kognitif remaja tentang fungsi *output* ($r = 0,3517$).

Berbeda dengan ketiga domain tadi, korelasi terpaan berita politik dan perubahan tanggapan kognitif remaja tentang kapabilitas sistem politik Indonesia tergolong kuat ($r = 0,7124$). Sementara, keterlibatan budaya komunikasi keluarga dalam

keseluruhan proses perubahan tadi diindikasikan oleh korelasi yang cukup kuat ($r = 0,6380$).

Korelasi yang lemah antara terpaan berita politik dengan perubahan tanggapan kognitif remaja tentang fungsi *input*, proses konversi, dan fungsi *output* mengisyaratkan terpaan berita politik kurang bisa diandalkan untuk menjelaskan perubahan yang dialami remaja dalam aspek pengetahuannya tentang mekanisme *input*, proses konversi, dan *output* sistem politik Indonesia. Hal ini terlihat dari koefisien determinasinya, di mana 8,8% perubahan yang terjadi pada kognisi remaja tentang fungsi *input* dapat dijelaskan oleh terpaan berita politik melalui korelasi liniernya.

Demikian pula hanya 10,01% perubahan yang terjadi pada kognisi remaja tentang fungsi konversi dan hanya 12,2% perubahan yang terjadi pada kognisi remaja tentang fungsi *output* dapat dijelaskan oleh terpaan berita politik yang disajikan radio, televisi, dan surat kabar. Hal ini berbeda cukup mencolok dengan kemampuan terpaan berita politik dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada kognisi remaja tentang kapabilitas siswa politik Indonesia, di mana 50,8% perubahan tanggapan kognitif remaja tentang kapabilitas sistem politik Indonesia dapat dijelaskan oleh terpaan berita politik melalui koefisien korelasinya.

Mengapa korelasi terpaan berita politik dan perubahan tanggapan kognitif remaja tentang fungsi *input*, proses konversi, dan fungsi *output* lebih rendah dibanding korelasi terpaan berita politik dan perubahan tanggapan kognitif remaja tentang kapabilitas sistem politik Indonesia? Bahkan, lebih rendah jika dibandingkan dengan korelasi budaya komunikasi keluarga dan perubahan tanggapan kognitif remaja tentang fungsi *input*, proses konversi, dan fungsi *output* serta kapabilitas sistem politik Indonesia?

Mengacu kepada teori belajar sosial (*social learning theory*, Bandura, 1972), gejala di atas dapat dijelaskan dalam kerangka interaksi timbal balik antara individu dengan faktor-faktor penentu dari lingkungan. Kerangka teoretis tadi tidak memandang individu sebagai makhluk lemah yang tidak berdaya menahan terpaan media massa, tetapi bukan pula makhluk perkasa yang dapat menafikan

semua pengaruh media massa. Individu diyakini aktif menyeleksi, bahkan menegosiasikan makna atas pesan yang menerpanya.

Berdasarkan pendekatan tadi, tingkat keeratan variabel terpaan berita politik dan perubahan tanggapan kognitif dapat dijelaskan dari dua segi, yakni (1) karakteristik terpaan media massa sebagai faktor stimulus perubahan tanggapan kognitif khalayak, dan (2) organisasi kognisi remaja tentang fungsi-fungsi sistem politik Indonesia sebagai faktor personal yang menentukan selektivitas kognisi.

Rendahnya korelasi terpaan berita politik dengan fungsi *input*, proses konversi, dan fungsi *output* dibanding perubahan tanggapan kognitif remaja tentang kapabilitas sistem politik Indonesia tidak terlepas dari kemampuan media massa dalam menjelaskan hal-hal tadi kepada khalayaknya. Selain disebabkan oleh kekurangjelasan dan kekuranglengkapan informasi, sebagaimana diakui oleh 46,44% responden, perbedaan korelasi tadi disebabkan pula karena simbol dan substansi yang terkandung dalam berita politik berada di luar dunia kognitif remaja. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa: (1) berita politik yang disajikan tidak diformat secara khusus bagi remaja, (2) aktivitas politik yang sesungguhnya (*political realm*) belum menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari remaja. Hal ini berarti, derajat sentralitas berita politik terhadap remaja tergolong rendah.

Agenda media yang didominasi seruan kandidat agar pemilih menggunakan haknya, janji-janji, keterlibatan dalam pilkada sebagai salah satu bentuk karakter warga negara yang baik turut menentukan derajat hubungan media dan pembelajaran politik remaja. Kritik terhadap kinerja pemerintah yang disampaikan beberapa kalangan dalam format catatan akhir tahun secara eksplisit menguraikan lemahnya kemampuan (*capability*) pemerintah.

Kelangkaan minyak tanah, padahal Indonesia dikenal sebagai salah satu pengeksport terbesar, dihubungkan dengan rendahnya kapabilitas eksploratif pemerintah. Ketiadaan minyak goreng, kedelai, dan terigu, hingga memicu harga barang kebutuhan pokok adalah contoh konkret lemahnya

kapabilitas distributif. Munculnya berbagai penyelewengan adalah contoh telanjang lemahnya kapabilitas regulatif. Klaim Malaysia tentang Reog Ponorogo dan lambannya respons Pemerintah RI adalah wujud nyata rendahnya kapabilitas simbolik dan responsif sistem politik Indonesia.

Berita tentang hal-hal tadi mengkonkretkan fungsi kapabilitas dibanding pemberitaan tentang fungsi *input*, proses konversi, dan fungsi *output* sistem politik. Menjadi masuk akal bila remaja lebih memahami fungsi kapabilitas sistem politik. Hal ini pun mengindikasikan bahwa remaja menilai entitas politik dari realitas yang mereka lihat dan rasakan dalam kehidupan nyata.

Asumsi ini dikukuhkan oleh nilai rata-rata pengetahuan remaja tentang fungsi *input*, proses konversi, dan fungsi *output* yang mencapai 6,15; 6,40; dan 6,55. Sementara, rata-rata tingkat pengetahuan siswa tentang fungsi kapabilitas mencapai 7,46. Praksis politik yang berada di luar khasanah pemikiran sebagian besar remaja harus dikonkretkan melalui fakta dan peristiwa yang teramati.

Dalam konteks ini, isu tidak memilih (golput) yang selalu merebak menjelang pemilu disebabkan sentralitas pemberitaan politik yang kurang tertuju pada remaja. Agenda politik (baik yang diliput media maupun tidak) kerap tidak menyentuh masalah yang dihadapi, atau persoalan yang dinilai penting, oleh remaja. Sebagai pemilih pemula, remaja kerap tercerabut dari wilayah politik.

Budaya Komunikasi Keluarga

Budaya komunikasi keluarga berperan penting dalam membentuk perilaku bermedia remaja. Ke dalamnya termasuk cara-cara remaja menyeleksi ragam berita yang disajikan media, pembicaraan politik yang berlangsung di tengah keluarga, dan cara-cara keluarga menghargai informasi.

Korelasi budaya komunikasi keluarga dan perubahan tanggapan kognitif remaja tentang fungsi *input*, proses konversi, dan *output* serta kapabilitas sistem politik Indonesia cukup kuat ($r = 0,6387$). Korelasi tersebut satu tingkat lebih kuat dibandingkan dengan korelasi terpaan berita politik dan perubahan tanggapan kognitif remaja

tentang fungsi-fungsi sistem politik Indonesia. Sedangkan, bila dilihat dari koefisien determinasinya, maka budaya komunikasi keluarga mampu menjelaskan 40,7% perubahan tanggapan kognitif remaja tentang fungsi *input*, proses konversi, dan *output*, serta kapabilitas sistem politik Indonesia.

Faktor di atas dapat dijelaskan lebih lanjut oleh pendapat sejumlah pendukung teori pengaruh terbatas (*limited effects theory*), di samping oleh hukum *mendelian* dari politik. Meskipun media massa kerap dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengajarkan kejahatan, kemampuan media dalam mengubah kognisi seseorang secara menyeluruh tampaknya amat terbatas. Karena, demikian Klapper (1960), perubahan tanggapan kognitif yang terjadi bukanlah semata-mata pengaruh media. Media hanya memperkuat (*reinforce*) kognisi yang sudah ada. Perubahan itu hanya sebagian saja disebabkan oleh terpaan media massa.

Pikiran-pikiran para pendukung teori pengaruh terbatas sejalan dengan pendapat para pakar sosialisasi politik (Hyman, 1989; Easton dan Hess, 1962; Lane, 1959; Chaffee dan Tims, 1982), yang bermuara pada anggapan bahwa media massa bukan penyebab tunggal perubahan tanggapan kognitif politik remaja.

Lebih khusus lagi, terpaan berita politik media massa teruji berkorelasi dengan perubahan tanggapan kognitif politik. Namun, terdapat variabel lain yang terlibat dalam keseluruhan proses perubahan tadi (Chaffee dan Tims, 1982). Perubahan tadi untuk sebagian dipengaruhi oleh perilaku komunikasi sehari-hari, baik perilaku individu maupun perilaku yang ditampilkan komunitas sosial, terutama budaya komunikasi keluarga, yang diciptakan orang tua (*parental initiation*), motivasi, kemudahan dan pengalaman komunikasi individu.

Perhitungan statistika di atas, dikuatkan oleh pengakuan siswa tentang kontribusi media dalam membentuk tanggapan kognitifnya. Sebagaimana diakui 74,5% responden, pengetahuan tentang hal tersebut diperoleh dari anggota keluarga, teman bermain, teman sekolah, dan berita media massa.

Di sisi lain, keterlibatan budaya komunikasi keluarga dalam proses sosialisasi politik telah lama diakui Hyman (1969), terutama dalam hal penanaman kerangka dasar ideologis. Menurutnya, sosialisasi politik yang dijalani anak-anak dan remaja lebih dipengaruhi keluarga, berbeda dengan orang dewasa yang lebih terpengaruh media massa. Boleh jadi, karena kedudukannya sebagai agen utama dan pertama dari serangkaian proses sosialisasi politik, Plano (1982) menempatkan keluarga sebagai kunci yang menentukan proses sosialisasi politik.

Ditinjau dari teori belajar sosial, belajar politik dari sesama anggota keluarga sangat dimungkinkan, baik melalui *modeling* maupun belajar melalui konsekuensi respons. Belajar melalui *modeling* dalam keluarga sangat dimungkinkan karena anak cenderung merefleksikan orientasi politik orang tuanya, karena orientasi itu dipertukarkan oleh orang tua mereka (Jenning dan Niemi, 1981, dalam Tan, 1981). Selain karena dipertukarkan, remaja pun dapat belajar dari orang tuanya karena perilaku politik orang tua dinilai anak lebih konsisten. Selain itu, bila meniru perilaku tadi, anak akan diganjar lebih kuat ketimbang ketika meniru model yang disajikan media massa (Rohter, 1975, dalam Tan, 1991).

Sejauh yang dapat dicermati dari literatur dan penelitian tentang sosialisasi politik, tidak ditemukan pola umum proses sosialisasi politik. Namun, peranan keluarga dalam proses sosialisasi politik adalah suatu realitas, karena proses itu berdasar pada tugas keluarga yang lebih luas, yakni memuaskan kebutuhan-kebutuhan anak, baik jasmani, afeksi, maupun cinta (Davies, 1965).

Penanaman nilai-nilai dan orientasi politik dalam keluarga merupakan bagian dari pengasuhan anak (*children rearing*), baik disengaja maupun tidak. Melalui berbagai kontak dalam *setting* keluarga, terjadilah pewarisan nilai-nilai politik dari orang tua, yang oleh Lane (1959) disebut sebagai Hukum Mendelian dalam politik. Bila dikaitkan dengan kontribusi media massa dalam membentuk kognisi politik remaja tentang fungsi *input*, proses konversi, dan *output* serta kapabilitas sistem politik Indonesia, fakta di atas mengisyaratkan bahwa

berita politik yang disajikan radio, televisi, dan surat kabar berperan penting dalam proses tadi, namun bukanlah satu-satunya dan bukan pula agen yang utama.

Selain itu, bila dalam penelitian ini, korelasi terpaan berita politik dan kognisi remaja tentang fungsi *input*, proses konversi, dan *output* lebih rendah dibanding korelasinya dengan budaya komunikasi keluarga, hal ini lebih dikarenakan berita politik yang disajikan radio, televisi, dan surat kabar umumnya berada di luar jangkauan kognitif anak usia SMU. Hal ini dikuatkan oleh fakta bahwa korelasi terpaan berita politik dengan perubahan tanggapan kognitif remaja tentang kapabilitas sistem politik Indonesia – suatu materi berita yang relatif lebih familiar di kalangan remaja dibanding materi tentang fungsi *input*, proses konversi, dan *output* – ternyata kuat. Bahkan, setaraf lebih kuat dibandingkan korelasi budaya komunikasi keluarga dan proses perubahan tanggapan kognitif.

Betapapun kecilnya, peningkatan terpaan berita politik akan diikuti oleh peningkatan taraf kognisi politik remaja tentang fungsi-fungsi dan kapabilitas sistem politik Indonesia. Peningkatan tadi akan lebih berarti bila kondisi budaya komunikasi keluarga diperbaiki, khususnya menyangkut kualitas komunikasi dengan anggota keluarga dan guru di sekolah yang secara tegas mengganjar remaja karena aktivitasnya menggunakan berita politik yang disajikan media massa sebagai bahan pengayaan (*enrichment*) materi resmi (*formal content*).

Penutup

Kemampuan terpaan berita politik yang disajikan media massa dalam menjelaskan perubahan tanggapan kognitif remaja tentang fungsi-fungsi sistem politik lebih rendah daripada kemampuannya menjelaskan perubahan tanggapan kognitif remaja tentang kapabilitas sistem. Perbedaan ini lebih dikarenakan materi berita politik yang berkenaan dengan fungsi-fungsi sistem politik kurang relevan dengan tingkat perkembangan kognitif sebagian besar remaja. Selain itu, praktik politik yang sesungguhnya belum menjadi aktivitas sehari-hari sebagian besar

anak usia SMU. Hal ini berarti, sentralitas informasi yang disajikan berita politik media massa terhadap kelompok khalayak usia SMU rendah.

Budaya komunikasi keluarga ternyata lebih mampu menjelaskan perubahan tanggapan kognitif remaja tentang fungsi-fungsi sistem politik. Perbedaan ini terjadi karena: (1) ketidakcocokkan materi berita dengan perkembangan kognitif remaja; (2) kesederhanaan dan konsistensi orientasi politik yang dipertukarkan dalam budaya komunikasi keluarga; dan (3) kenyataan bahwa aktivitas remaja meniru perilaku politik orang tuanya akan lebih diganjar daripada ketika mereka meniru perilaku politik yang disajikan media massa.

Meski dalam taraf yang rendah, pemelekwacanaan politik (*political literacy*) terjadi melalui pemanfaatan berita politik di kalangan remaja. Hanya kontribusinya dalam membentuk tanggapan kognitif tentang fungsi-fungsi sistem politik rendah. Dalam kerangka praktis, temuan ini mengandung implikasi bahwa: (1) terpaan berita politik tentang partai politik dan kandidat tidak simetris dengan jumlah suara yang akan diraih dari kalangan remaja; (2) sosialisasi politik termasuk sosialisasi pilgub/pilbup tidak boleh dianggap tuntas hanya karena telah memuat himbauan, prosedur, dan mekanisme pemilihan di dalam media massa.

Daftar Pustaka

- Axford, Barrie & Richard Huggins. 2001. *New Media and Politics*. London: SAGE Publications.
- Easton, David. 1964. *A Systems Analysis of Political Life*. Chicago: University of Chicago.
- Lilleker, Darren G, Nigel A. Jackson & Richard Scullion. 2006. *The Marketing of Political Parties: Political Marketing at the 2005 British General Election*. Manchester: Manchester University Press.
- Nimmo, Dan D. dan Keith R. Sanders. 1981. *Handbook of Political Communication*. California: Sage Publication, Inc.
- Becker, Lee B. 1975. "The Development of Political Cognitions" dalam Steven H. Chaffee, 1975. *Political Communication Issues and Strategies for Research*. California: Sage Publication.
- Chaffee, Steven H dan Albert R. Tims. 1982. "News Media Use in Adolescence Implications for Political Cognition". Dalam Michael Burgoon (eds.), *Communication Year Book 6*. Pp. 736-758, Beverly Hill: Sage Publication.
- Crow. Lester D. dan Alice Crow. 1965. *Adolescent Development & Adjustment*. New York: McGraw-Hill Company.
- DeFleur, Melvin L dan Sandra Ball-Rokeach. 1989. *Theories of Mass Communication*. Fifth Edition, London: Longman.
- Deutsch, Karl W. 1963. *The Nerves of Governmen*. London: The Free Press of Glencoe.
- Graber, Doris. 1996. *News Media and American Politics*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Harsono Suwardi. 1993. "Pers dan Pemilu di Indonesia: Suatu Studi Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita-berita Kampanye Pemilu 1987 pada 10 Surat Kabar di Indonesia". Ringkasan Disertasi, dalam Jurnal *Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*. No. 7 & 8, Jakarta: ISKI & Gramedia Pustaka Utama Pp. 33-45.
- Jackson, Karl D. dan Lucian W. Pye. 1978. *Political Power and Communication in Indonesia*. California: The Regent of The University of California.
- Kraus, Sidney dan Dennis Davis. 1976. *The Effects of Mass Communication of Political Behavior*. USA: The Pennsylvania State University.
- Plano, Jack C, Robert E. Riggs, dan Helenan R. Robin. 1982. *The Dictionary of Political Analysis*. California: ABC-CLIO.